

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Administrasi publik adalah sebuah ilmu yang dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik. Menurut Caiden (1982) administrasi publik adalah fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerja sama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program pemerintah, pemantapan dan perubahan organisasi, pengerahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian dan lain-lain, yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Selanjutnya menurut Pasolong (2007) administrasi publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Siagian (2008) memberikan batasan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan publik mengandung arti umum, Negara dan masyarakat atau orang banyak. Administrasi Publik membahas tentang bagaimana negara memiliki tugas

memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat melalui kebijakan publik untuk mencapai tujuan kepuasan masyarakat kepada pemerintah.

Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah. Menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara dalam bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman. Kebijakan publik bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata. Disamping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga adalah kebijakan publik sebab hal tersebut memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik berupa jenis sampah plastik dimana volumenya kian bertambah selaras dengan pertumbuhan penduduk Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan terkait kebijakan yang ada, maka diperlukannya evaluasi kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan jikalau suatu kebijakan sudah berjalan meskipun memang tidak terdapat batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi (Subarsono, 2005:119). Menurut Jones (Winarno, 2009:226) evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. Sedangkan Anderson (dalam Winarno, 2009:226) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau

penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dilakukan pada seluruh proses kebijakan.

Kota Semarang memiliki regulasi pengelolaan sampah yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga yang berasal dari fasilitas sosial, umum, kawasan industri, dan sampah spesifik seperti limbah B3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 menjelaskan untuk melarang siapa saja yang membawa masuk sampah ke wilayah Kota Semarang dan berkewajiban mengurangi serta menangani sampah berdasarkan wawasan lingkungan. Berdasarkan dari jenis sampah yang dikelola menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012, sampah plastik masuk ke dalam kategori sampah rumah tangga dan sejenisnya. Hal ini dikarenakan sampah plastik dapat berasal dari rumah tangga maupun sejenis rumah tangga seperti fasilitas umum, sosial dan kawasan industri.

Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Sampah Plastik. Peraturan ini berfokus untuk mengendalikan penggunaan plastik yang tercantum pada Pasal 2 yang berbunyi “Pengendalian penggunaan plastik bertujuan mengendalikan sampah plastik dari sumber penghasil sampah. Pengendalian bertujuan meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan,

perubahan iklim, meningkatnya partisipasi serta kesadaran masyarakat, mengurangi sampah rumah tangga dan sejenisnya, dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup”. Pengendalian dilakukan dengan bertujuan pada sasaran tertentu dengan mengganti kantong plastik menjadi kantong ramah lingkungan atau *totebag*.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 dapat menjadi awal yang baik dalam upaya untuk mengendalikan serta mengurangi penggunaan plastik di Kota Semarang. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala seperti peraturan yang masih baru sehingga mengakibatkan akses serta kecukupan data mengenai pengendalian sampah plastik dan kinerja dalam mengurangi sampah plastik masih terbatas (Rahmayani, 2021). Dalam pelaksanaannya, banyak UMKM, penjual makanan, kafe maupun restoran masih belum dapat menerapkan pengendalian penggunaan plastik. Selain UMKM, terdapat pasar tradisional yang setiap melakukan transaksi dengan secara bebas menggunakan kantong plastik. Sesuai dengan arahan dari Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 bahwa pipet plastik dan *Styrofoam* sudah tidak diperbolehkan namun kenyataannya masih saja digunakan.

Beberapa masyarakat menilai bahwa pemerintah kurang tegas dalam menindaklanjuti kafe sehingga seringkali pelaku usaha menggampangkan atau bahkan mengabaikan peraturan tersebut. Dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang hanya sampai pada tahap memberikan sanksi berupa teguran tertulis dan penempelan stiker di depan pintu usaha, belum sampai tahap sanksi pencabutan sementara izin usaha. Tentunya hal ini mengakibatkan para pelaku usaha

menyepelkan teguran tersebut dan membuat kesadaran dari masyarakat itu sendiri menjadi sulit terbangun.

Table 1. 1 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Tembalang

	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
Sisa Makanan	60.82	60.79	60.80
Kertas	10.19	10.18	10.20
Plastik	17.19	17.20	17.20
Logam	1.22	1.22	1.20
Kain	4.92	4.94	4.90
Karet Kulit	1.00	1.00	1.00
Kaca	1.79	1.79	1.80
Lainnya	2.88	2.85	2.90

Sumber: BPS Kota Semarang dan SIPSN

Kecamatan Tembalang memiliki penduduk terbanyak pertama di Kota Semarang pada tahun 2023 sebanyak 198.862 jiwa dengan timbulan sampah sebanyak 158,2 m³. Kecamatan Tembalang memiliki 18 TPS, 23 kontainer, dan 7 kendaraan pengangkut untuk menangani sampah dari TPS menuju TPA Jatibarang. Sampah plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang signifikan di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah timbulan sampah plastik di kecamatan ini terus mengalami kenaikan. Data dari BPS Kota Semarang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sampah berjenis plastik di Kecamatan Tembalang menyumbang 17,20% dari total sampah yang ada. Angka ini cenderung meningkat dibandingkan pada tahun 2021, di mana pada tahun 2021 sampah berjenis plastik memiliki presentase sebesar 17,19%. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan aktivitas ekonomi dan gaya hidup masyarakat yang cenderung menggunakan produk berbahan plastik sekali pakai.

Gambar 1. 1 Sampah di pinggir jalan di bersihkan oleh dinas



Sumber: DLH Kota Semarang

Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan mengakibatkan masyarakat membuang sampah secara sembarangan dan akhirnya mereka sendiri yang akan menjadi korban dari tindakan tersebut. Lingkungan yang kotor dapat menyebabkan pencemaran udara yang tidak sehat karena sampah yang dibiarkan terlalu lama akan memunculkan bau busuk. Hal ini dapat diperjelas melalui data yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Kota Semarang yang dimana jumlah timbulan sampah yang diperoleh sebanding dengan jumlah penduduk di Kecamatan Tembalang dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, masyarakat cenderung melakukan *work from home* (WFH) dan belanja secara *online* menyebabkan jumlah timbulan sampah yang diperoleh sangatlah banyak.

Selain itu, lemahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai juga turut berkontribusi terhadap tingginya timbunan sampah plastik. Meskipun telah ada upaya sosialisasi dari pemerintah, masih banyak masyarakat yang belum paham akan pentingnya pengurangan penggunaan plastik. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat cenderung belum mengetahui bahwasannya terdapat Peraturan Walikota Semarang No.27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik. Hal ini menjadi salah satu alasan yang mengakibatkan kesadaran masyarakat terhadap pengendalian penggunaan plastik masih perlu ditingkatkan.

Salah satu upaya pengendalian yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, adalah dengan melibatkan pelaku usaha, termasuk kafe dan restoran. Namun, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan para pelaku usaha di Kecamatan Tembalang masih belum mencakup seluruh wilayah. Banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan pembinaan secara langsung terkait regulasi ini. Hal ini mengakibatkan sebagian besar pelaku usaha masih belum memahami pentingnya peran mereka dalam mengurangi penggunaan plastik di lingkungan sekitar.

Gambar 1. 2 Program Pilah Sampah Dari Rumah



Sumber: DLH Kota Semarang

Kendala lainnya adalah kurang terpadunya program pengendalian penggunaan plastik yang berkelanjutan. Program "Semarang Ogah Nyampah" dan "Pilah Sampah dari Rumah" cenderung bersifat jangka pendek dan tidak terintegrasi secara menyeluruh antara sektor pemerintahan, pelaku usaha, dan masyarakat. Ketidakberlanjutan program ini membuat upaya pengendalian plastik menjadi kurang efektif, baik dari segi perencanaan maupun implementasi di lapangan. Hal ini diutarakan langsung oleh pihak DLH Kota Semarang yang mengatakan bahwasanya pelaksanaan program pengendalian penggunaan plastik berjalan dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu pada tahun 2019 hingga tahun 2022.

Table 1. 2 Tabel Jumlah Kafe per-Kecamatan di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Kafe
1.	Banyumanik	19
2.	Candisari	9
3.	Gajahmungkur	8

4.	Gayamsari	3
5.	Genuk	5
6.	Gunung Pati	12
7.	Mijen	10
8.	Ngaliyan	15
9.	Pedurungan	12
10.	Semarang Barat	16
11.	Semarang Selatan	19
12.	Semarang Tengah	16
13.	Semarang Timur	9
14.	Semarang Utara	8
15.	Tembalang	26
16.	Tugu	4

Sumber: data yang telah diolah oleh peneliti pada tahun 2024

Kecamatan Tembalang memiliki kafe terbanyak di antara kecamatan lainnya. Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik pada kafe yang berada di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Selain itu Kecamatan Tembalang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan populasi yang padat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, jumlah penduduk Kecamatan Tembalang mencapai 198.862 jiwa pada tahun 2023. Banyaknya Kafe di wilayah ini menunjukkan tingginya permintaan konsumen,

yang secara langsung berkorelasi dengan tingginya penggunaan kantong plastik sekali pakai, cup plastik, dan juga pipet plastik.

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas, mengindikasikan bahwa meskipun peraturan telah diterapkan penggunaan plastik masih tinggi, menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan yang ada. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Plastik Pada Kafe di Kecamatan Tembalang Kota Semarang”**.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya sanksi hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran penggunaan plastik yang dilakukan oleh pelaku usaha, pelaku bisnis, dan pasar tradisional.
2. Jumlah sampah plastik di Kecamatan Tembalang mengalami kenaikan.
3. Lemahnya kesadaran masyarakat.
4. Pembinaan dan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pelaku usaha yang kurang mencakup seluruh wilayah.
5. Belum terpaadunya program pengendalian penggunaan plastik yang benar dan berkelanjutan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Plastik Pada Kafe Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang?
2. Analisis pendukung dan penghambat dalam kebijakan pengendalian penggunaan plastik pada Kafe di Kecamatan Tembalang Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menjelaskan dan menganalisis mengenai pelaksanaan pengendalian Penggunaan Plastik Pada Kafe Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan pengendalian penggunaan plastik pada Kafe di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pustaka atau referensi untuk penelitian sejenis yang akan datang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan serta menjadikan bahan

referensi bagi pembaca dan masih dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh dari aktivitas pembelajaran selama periode perkuliahan.

2) Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan solusi dan pandangan yang berasal dari pihak di luar organisasi terkait bagaimana kebijakan pengurangan sampah terhadap lingkungan hidup di Kota Semarang. Adanya penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah dalam membuat keputusan maupun kebijakan. Melalui penelitian ini juga diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan membantu pemerintah dalam mengembangkan pelayanan publik.

3) Bagi Pembaca

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, pembaca dapat memperoleh pengetahuan tambahan terkait pengelolaan sampah serta kebijakan pengurangan sampah di Kota Semarang.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Table 1. 3 Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Akyas Aryan Permana, Drs. Ahmad Taufiq, M.Si., Dra. Puji Astuti, M.Si (2022)	Analisis Implementasi Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Plastik di Kota Semarang	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi dari Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 belum terlaksana dengan baik.	Perbedaan terletak pada teori yang digunakan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III sedangkan peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Bridgman Peter & Davis Tahun 2000 dan Daniel Stufflebeam (CIPP) Tahun 1966.
2.	Satrya Raul Neru, Ida Ayu Putu Widiati, dan I	Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis	Penerapan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 ini bagi pelaku usaha di pasar tradisional belum dapat dilakukan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan lokus penelitian berada di Kota Denpasar.

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Wayan Arthanaya (2021)	Kantong Plastik pada Pelaku Usaha Pasar Tradisional	sosiologis dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penelitian ini berfokus pada 3 landasan yang terdapat di kebijakan daerah yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.	dengan maksimal. Hal ini karena pelaku usaha di pasar tradisional tidak semua pelaku dapat melakukan kegiatan jual beli dengan tidak menggunakan kantong plastik. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk mengefektifkan pengurangan kantong plastik adalah melakukan sosialisasi dan juga memberikan sanksi administratif bagi yang melakukan pelanggaran.	
3.	Thalita Rifda Khaerani, Rosa Anggraeny, dan Muhammad Gilang	Inovasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik di Kota Balikpapan	Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data teknik kepustakaan dan teknik	Hasil penelitian menunjukkan inovasi kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu menghasilkan peluang melalui	Penelitian ini berfokus terhadap inovasi kebijakan sedangkan peneliti berfokus terhadap evaluasi kebijakan.

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Akbar Ramadhan (2021)		lapangan dengan observasi, interview, dokumentasi, dan FGD. Teori yang digunakan adalah teori inovasi menurut Mulgan dan Albury.	beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sehingga terdapat tren positif perubahan perilaku masyarakat.	
4.	Riyana Afila, Kismartini, R. Slamet Santoso (2022)	Monitoring Kebijakan Penggunaan Plastik di Kota Semarang	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori fungsi monitoring menurut William Dunn.	Hasil penelitian adalah monitoring yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah berjalan dengan baik. Namun dalam kegiatan monitoring yang dilakukan belum tercapai semua sasaran kebijakan. Dari keempat fungsi monitoring menurut Dunn, fungsi kepatuhan masih belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan belum adanya SOP yang diatur dan	Penelitian ini menggunakan teori fungsi monitoring menurut William Dunn sedangkan peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan Bridgman Peter & Davis Tahun 2000 dan Daniel Stufflebeam (CIPP) Tahun 1966.

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				petugas yang belum melaksanakan sesuai dengan peraturan khususnya pada ketentuan penegakan sanksi.	
5.	Junaidy, Sugiannor, Dely Anhar, Akhmad Nikhrawi Hamdie, dan Syahrial Saddiq (2022)	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn.	Berdasarkan indikator efektivitas dapat dikatakan belum optimal karena masih banyak sampah yang tertinggal di TPS pada luar jam batas pembuangan. Sedangkan pada Survei lain sudah berjalan dengan baik.	Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn sedangkan peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Bridgman Peter & Davis Tahun 2000 dan Daniel Stufflebeam (CIPP) Tahun 1966.
6.	Nada Zairina Wulandari dan Palupi Lindiasari Samputra (2021)	Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian survei pemakai	Berdasarkan penelitian dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kelurahan Basirih diketahui nilai indeks unit	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian survey pemakai melalui Survei Kepuasan

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Plastik di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin	melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat. Teori yang digunakan adalah evaluasi kebijakan menurut William Dunn.	pelayanan adalah 2,45 dan hasil dari nilai interval konversi 61,49 yang berada antara 25,00 – 64,99 yang menunjukkan mutu tingkat pelayanan D atau kinerja kebijakan pengurangan penggunaan kantong 17urvey17 adalah tidak baik atau tidak memuaskan.	Masyarakat, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
7.	Novike Bela Sumanik, Wayrohi Meilvidiri, Lamtiar Siregar, dan Serli Hatul Hidayat (2021)	Public Policy Analysis on Plastic Waste Control in Merauke	Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis berbasis bukti dengan cara mengevaluasi literatur-literatur yang mempengaruhi kesadaran lingkungan pada setiap individu.	Hasil penelitian menunjukkan tingkat konsumsi plastik masih tinggi walaupun diketahui akan berdampak. Kebiasaan membawa kantong ramah lingkungan di supermarket tidak diterapkan ketika pasar tradisional (presdisposisi). Pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana akan tetapi	Penelitian ini tidak memaparkan teori yang digunakan dan menggunakan metode analisis berbasis bukti yang terdiri dari faktor predisposisi (pengetahuan, perilaku, dan pendidikan), faktor pemberdaya (infrastruktur), dan faktor penguat (kebijakan dan regulasi).

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				rasio sarana prasarana tidak sebanding dengan jumlah penduduk Merauke sehingga implementasi dari kebijakan tersebut perlu dikaji kembali.	
8.	Feng Gu, Zhaowei Zhu, dan Sharafat Ali (2023)	Analysis of Factors of Single-Use Plastic Avoidance Behavior for Environmental Sustainability in China	Penelitian ini menggunakan metode cross-sectional dan pendekatan survey mandiri untuk penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi kebijakan sangat penting untuk meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai di China. Para pengambil kebijakan harus mengembangkan dan melaksanakan peraturan yang menangani sikap, perilaku buruk, dan persepsi kontrol perilaku karena elemen-elemen ini akan berdampak pada niat dan kepedulian masyarakat terhadap perilaku penghindaran plastik.	Penelitian ini menggunakan metode cross-sectional dan pendekatan survey mandiri untuk penelitian.

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				Dalam hal ini, pemerintah harus menyusun strategi pendidikan lingkungan hidup yang inovatif untuk mendidik masyarakat tentang masalah lingkungan hidup, solusi dan dampak dari perilaku individu. Selain itu, penggunaan platform media sosial akan membantu mendorong pro lingkungan dan mengadopsi nilai-nilai budaya yang mendukung pelestarian lingkungan. Dengan cara ini, para pengambil kebijakan akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang lebih sadar lingkungan di kalangan masyarakat sehingga akan produktif dalam menurunkan dampak negatif	

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				terhadap lingkungan dari plastik sekali pakai.	
9.	Matilda Eve Dunn, Morena Mills dan Diogo Verissimo (2020)	Evaluating the Impact of the Documentary Series Blue Planet II on Viewers' Plastic Consumption Behaviors	Penelitian ini menggunakan uji coba kontrol secara acak untuk menguji pengaruh relatif pesan konservasi di dalamnya pada penonton film documenter Planet Biru II. Peserta direkrut melalui poster yang disebar ke seluruh wilayah setempat dan secara online.	Hasil penelitian menemukan bahwa integrasi berbagai strategi intervensi merupakan cara paling efektif untuk mempertahankan perubahan perilaku dalam konteks lingkungan. Oleh karena itu, studi lebih lanjut mengenai dampak film documenter dan intervensi media massa lainnya harus mempertimbangkan ukuran perubahan perilaku individu serta perubahan masyarakat yang lebih luas. Hasilnya masyarakat menjadi lebih peduli melalui tindakan merawat lingkungan namun belum terdapat kebijakan untuk	Penelitian ini mengevaluasi terhadap penonton film documenter Planet Biru II terhadap para konsumen plastik. Sedangkan peneliti terjun ke lapangan dan dinas yang berkaitan secara langsung untuk meneliti.

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				memberikan dampak yang lebih luas.	
10.	Yahya Saleh Ibrahim (2021)	Evaluation of Policies and Regulation on Plastic Waste Recycling and Its Impact on the Aesthetic of Kaduna Metropolis	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan survei teknik kelompok nominal yang diadopsi untuk menghasilkan data untuk studi dan analisis.	Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan sampah plastik di kota metropolitan Kaduna belum berkembang sesuai harapan. Undang-undang yang mengatur pengumpulan dan pembuangan sampah plastik di negara ini masih lemah dan penegakan hukum yang hampir tidak ada.	Penelitian ini menunjukan bahwa di Kaduna, Nigeria belum terdapat kebijakan dan peraturan dengan kapasitas penegakan hukum untuk permasalahan sampah plastik. Sedangkan peneliti menggunakan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 sebagai acuan dalam penelitian.

Hasil penelitian terdahulu lebih menjelaskan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai kebijakan pengurangan plastik di beberapa kota di Indonesia dan di luar negeri. Hasil penelitian terdahulu juga lebih melihat permasalahan sampah plastik berdasarkan dari sisi hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga yang menjadi perbedaan pada penelitian lalu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah plastik di Kota Semarang yang dilihat dari sudut pandang Kebijakan Publik dan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Daniel Stufflebeam yaitu evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Oleh karena itu diperlukan sebuah ide atau gagasan yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Terhadap Lingkungan Hidup di Kota Semarang belum pernah dilakukan.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik terdiri dari dua kata yaitu administrasi dan publik. Administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *ad* yang berarti intensif dan *ministrare* yang artinya melayani (to serve). Secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *administration* dengan bentuk infinitifnya *to administer* yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Dengan demikian, administrasi adalah membantu atau melayani dengan intensif. Sedangkan publik mengandung arti umum, Negara dan masyarakat atau orang banyak. Jefkins (2004) mendefinisikan publik sebagai sekelompok orang atau

orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, Ruslan (1997) menyatakan publik mempunyai konotasi sempit dan spesifik yang merupakan sekumpulan individu-individu yang terikat suatu ikatan solidaritas tertentu.

Menurut Caiden (1982) administrasi publik adalah fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerja sama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program pemerintah, pemantapan dan perubahan organisasi, pengerahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian dan lain-lain. Yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Selanjutnya menurut Pasolong (2007) administrasi publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Siagian (2008) memberikan batasan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan publik mengandung arti umum, Negara dan masyarakat atau orang banyak.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah ilmu dan seni yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam organisasi publik yang secara rasional bekerja sama untuk mencapai tujuan publik. Pengertian administrasi publik yang lebih luas adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi publik secara

rasional melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap orang dan sarana prasarana untuk mencapai tujuan publik yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Ilmu administrasi publik terus berkembang hingga zaman sekarang ini. Perkembangan ilmu administrasi publik dalam perspektif modern, dapat ditinjau dari berbagai cara pandang. Menurut Nicholas Henry dalam Keban (2014:31) telah terjadi enam paradigma dalam administrasi negara seperti yang diuraikan sebagai berikut.

Paradigma 1 (1900-1926) dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh-tokoh dari paradigma tersebut adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam tulisannya yang berjudul “Politics and Administration” pada tahun 1900 mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi kehendak rakyat sedangkan administrasi memberikan perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi ini dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak rakyat tersebut. Badan yudikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Implikasi dari paradigma tersebut adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai sesuatu yang bebas nilai dan diarahkan untuk mencapai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*.

Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-prinsip Administrasi. Tokoh-tokoh terkenal dari paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling, Reporting, Budgeting*) yang menurut mereka dapat diterapkan dimana saja atau bersifat universal. Sedangkan lokus administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat dilakukan dimana saja termasuk di organisasi pemerintah. Sehingga diperoleh bahwa paradigma ini menekankan fokus dibandingkan lokusnya.

Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Morstein-Marx adalah seorang editor buku “Elements of Public Administration” di tahun 1946 yang mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis, sementara Herbert Simon mengarahkan kritiknya terhadap ketidak konsistenan prinsip administrasi dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal. Akibatnya muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik yang dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintah sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik yang mengandung banyak kelemahan. Sayangnya, mereka yang tidak mengajukan kritikan terhadap prinsip-prinsip administrasi tidak memberikan jalan keluar tentang fokus yang digunakan dalam administrasi publik.

Paradigma 4 (1956-1970) yang dimana menempatkan administrasi publik ke dalam Ilmu Administrasi. Fokus di dalam paradigma ini terdiri atas perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dan lain sebagainya. Dalam mengembangkan paradigma ini memiliki dua percabangan, yakni berfokus kepada berkembang ilmu administrasi murni yang didorong dengan disiplin di dalam psikologi sosial serta berfokus pada kebijakan publik. Seluruh orientasi ini penerapannya dapat dilakukan pada tahap lingkup administrasi publik dan juga bisnis. Sehingga diketahui bahwa paradigma ini tidak memiliki kejelasan dalam segi lokusnya.

Paradigma 5 (1970) merupakan Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Di dalam paradigma ini terlihat kejelasan di dalam fokus beserta lokusnya, yang dimana paradigma ini berorientasi terhadap teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik dan berfokus pada persoalan beserta kepentingan publik. Sehingga sudah jelas bahwa paradigma ini mempunyai fokus beserta fokus yang digambarkan dengan jelas.

Paradigma 6 (1990-sekarang) merupakan paradigma Governance. Paradigma ini menjadi suatu paradigma yang terbaru berdasarkan proses perkembangan ilmu administrasi publik yang tersusun atas serangkaian paradigma yang telah dikemukakan sebelumnya. Pandji Santosa dalam buku Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance memaparkan pilar di dalam paradigma ini yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal inilah yang kemudian membedakan paradigma ini dengan paradigma yang lain yaitu

pemaparan akan government yang merupakan penyelenggara pemerintah. Dengan adanya pergantian dari government ke arah governance yang merincikan perihal perpaduan di dalam stabilitas pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*) sehingga arah perkembangan paradigma ini menuju pada pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penelitian ini termasuk dalam paradigma administrasi 6 yakni paradigma yang berdasarkan proses perkembangan ilmu administrasi publik yang tersusun atas serangkaian paradigma yang telah dikemukakan sebelumnya dimana akan ada perubahan tata pemerintah yang baik (*good governance*) dengan memberikan pelayanan publik yang baik dan meningkatkan kinerja para pegawai untuk mencapai kepuasan masyarakat selaku pengguna pelayanan publik. Paradigma administrasi 6 membahas tentang bagaimana negara memiliki tugas memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat melalui kebijakan publik untuk mencapai tujuan kepuasan masyarakat kepada pemerintah.

1.5.3 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah. Menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara dalam bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman. Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman dalam bertindak bagi pengambilan suatu keputusan. Secara terminology, definisi kebijakan publik memiliki banyak arti. Semua itu tergantung dari sudut pandang seseorang dalam mengartikannya. Kebijakan publik adalah sebuah kewenangan yang dimiliki pemerintah.

Menurut Thomas R. Dye (1992) yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah “*public policy is whatever governments choose to do or not to do?*” (kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Sedangkan menurut James E. Anderson (1970) “*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Anderson juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah.

Menurut Aminullah dalam Muhammadi (2001) kebijakan merupakan upaya/tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Said Zainal Abidin (2004), kebijakan publik itu tidaklah bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan strategis. Oleh karenanya kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya. Sedangkan menurut Gerston, kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat. Upaya tersebut dilakukan di dalam setiap tingkatan pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik. Proses penentuan pada sebuah kebijakan publik mencakup lima tahapan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sebuah isu kebijakan publik.
- b. Mengembangkan proposal kebijakan publik.
- c. Melakukan advokasi kebijakan publik.

- d. Melaksanakan kebijakan publik.
- e. Mengevaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan.

Dari berbagai definisi kebijakan publik menekankan bahwa kebijakan publik adalah hal-hal mengenai perwujudan atau tindakan. Kebijakan publik bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata. Disamping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga adalah kebijakan publik sebab hal tersebut memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik berupa jenis sampah plastik dimana volumenya kian bertambah selaras dengan pertumbuhan penduduk Kota Semarang. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan terkait kebijakan yang ada, maka diperlukannya evaluasi kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik.

1.5.4 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan jikalau suatu kebijakan sudah berjalan meskipun memang tidak terdapat batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi (Subarsono, 2005:119). Menurut Jones (Winarno, 2009:226) evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. Sedangkan Anderson (dalam Winarno, 2009:226) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya,

evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dilakukan pada seluruh proses kebijakan.

Berbeda dengan pendapat tersebut, Dunn (dalam Nugroho, 2009:536) menegaskan bahwa,

“Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*arrassement*). Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi”.

Menurut Bridgman Davis 2000:130 Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu : 1 indikator input, 2 indikator process, 3 indikator outputs dan 4 indikator outcomes. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 1. Indikator *input* masukan memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. 2. Indikator *proscess* proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan

kebijakan publik tertentu. 3. Indikator *outputs* hasil memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu. 4. Indikator *outcomes* dampak memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Indikator dampak bertujuan untuk mengidentifikasi suatu program apakah berjalan dengan baik atau tidak dengan menilai manfaat dari adanya program tersebut (Septiani, 2020: 38).

Sedangkan Daniel Stufflebeam (1993) mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat untuk pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Untuk mewakili 4 (empat) keputusan terdapat 4 (empat) jenis evaluasi yang masing-masing diperuntukkan bagi setiap keputusan yaitu a.) *context evaluation as a means of servicing planning decisions*, b.) *input evaluation these structuring decision*, c.) *process evaluation to guide implementing*, d.) *product evaluation to serve recycling decisions*. Adapun aspek-aspek dari setiap model CIPP (*context, input, process* dan *product*) akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Evaluasi konteks (*context evaluation*)

Stufflebeam (1993) menjelaskan jika “*the primary orientation of a context evaluation is to identify the strengths and weaknesses of some object, such as an institution, a program, a target population, or a person, and to provide direction for improvement*”. Hal ini dapat diartikan orientasi utama dari evaluasi konteks adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari beberapa objek seperti

institusi, program, populasi target, atau seseorang dan untuk memberikan arahan untuk perbaikan. Stufflebeam juga menjelaskan jika evaluasi konteks merupakan penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan program (latar belakang yang mempengaruhi tujuan dan strategi yang akan dikembangkan atau dicapai dalam sistem program), legalitas program, dukungan lingkungan, karakteristik populasi dan sasaran serta tujuan program.

b. Evaluasi masukan (*input evaluation*)

Stufflebeam (1993) mengemukakan “*the main orientation of an input evaluation is to help prescribe a program by which to bring about needed changes*”. Diartikan orientasi utama dari evaluasi masukan adalah untuk membantu mereseapkan sebuah program yang digunakan untuk membawa perubahan tentang kebutuhan. Stufflebeam (1993) menjelaskan evaluasi input menyediakan informasi tentang aspek sarana prasarana yang mendukung tercapainya tujuan program yang ditetapkan. Komponen input mencakup indikator SDM (sasaran program, pendamping dan pengelola program), materi pelatihan, jenis kegiatan, sarana dan prasarana pendukung, dana/anggaran, prosedur atau aturan yang diperlukan.

c. Evaluasi proses (*process evaluation*)

Selanjutnya Stufflebeam (1993) mengemukakan “*the process evaluator could review the program plan and any prior evaluation on which it is based to identify on which it is based to identify important aspects of*

the program that tidak be monitored". Lebih lanjut Stufflebeam (1993) menjelaskan jika evaluasi proses menyediakan informasi untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur dan strategi yang dipilih di lapangan, sejauh mana rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan apakah mempertimbangkan karakteristik sasaran program. Komponen proses mencakup tindakan persiapan, proses pemberdayaan, bimbingan usaha, kemitrausahaan, pengendalian pelaksanaan program, hambatan/dukungan yang dijumpai selama pelaksanaan program.

d. Evaluasi produk/hasil (*product evaluation*)

Stufflebeam (1993) menjelaskan tujuan evaluasi produk "*the purpose of a product evaluation is to measure, interpret, and judge the attainments of a program*". Yang berarti tujuan dari evaluasi produk adalah untuk mengukur, menafsirkan dan menilai pencapaian dari program. Lebih lanjut Stufflebeam (1993) menjelaskan jika evaluasi produk menghasilkan informasi untuk menentukan sejauhmana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dan untuk menentukan apakah strategi, prosedur atau metode yang telah diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut harus dihentikan, diperbaiki, atau dilanjutkan dalam bentuknya yang sekarang. Komponen produk mencapai indikator pencapaian tujuan,

dampak program terhadap sasaran didik, orang tua/masyarakat dan penyelenggara.

Berdasarkan keempat aspek evaluasi kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah aktivitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kebijakan yang dijalankan sudah mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, apakah sumber daya Manusia, uang atau infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Proses memfokuskan pada penilaian efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu, bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Hasil memfokuskan penilaian misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Selanjutnya, dampak memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan, seperti pendapat Anderson yang menekankan bahwa evaluasi kebijakan lebih bersifat fungsional karena dapat dilakukan pada setiap proses kebijakan.

1.5.5 Kebijakan Pengendalian Plastik

Sampah plastik di lautan dapat membahayakan kesehatan kehidupan makhluk hidup. Studi yang dilakukan oleh LIPI merilis data bahwa perairan Indonesia telah tercemar oleh mikroplastik. Karena permasalahan tersebut, untuk mengurangi penggunaan plastik pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan jumlah peredaran sampah plastik. Dalam upaya penanganan

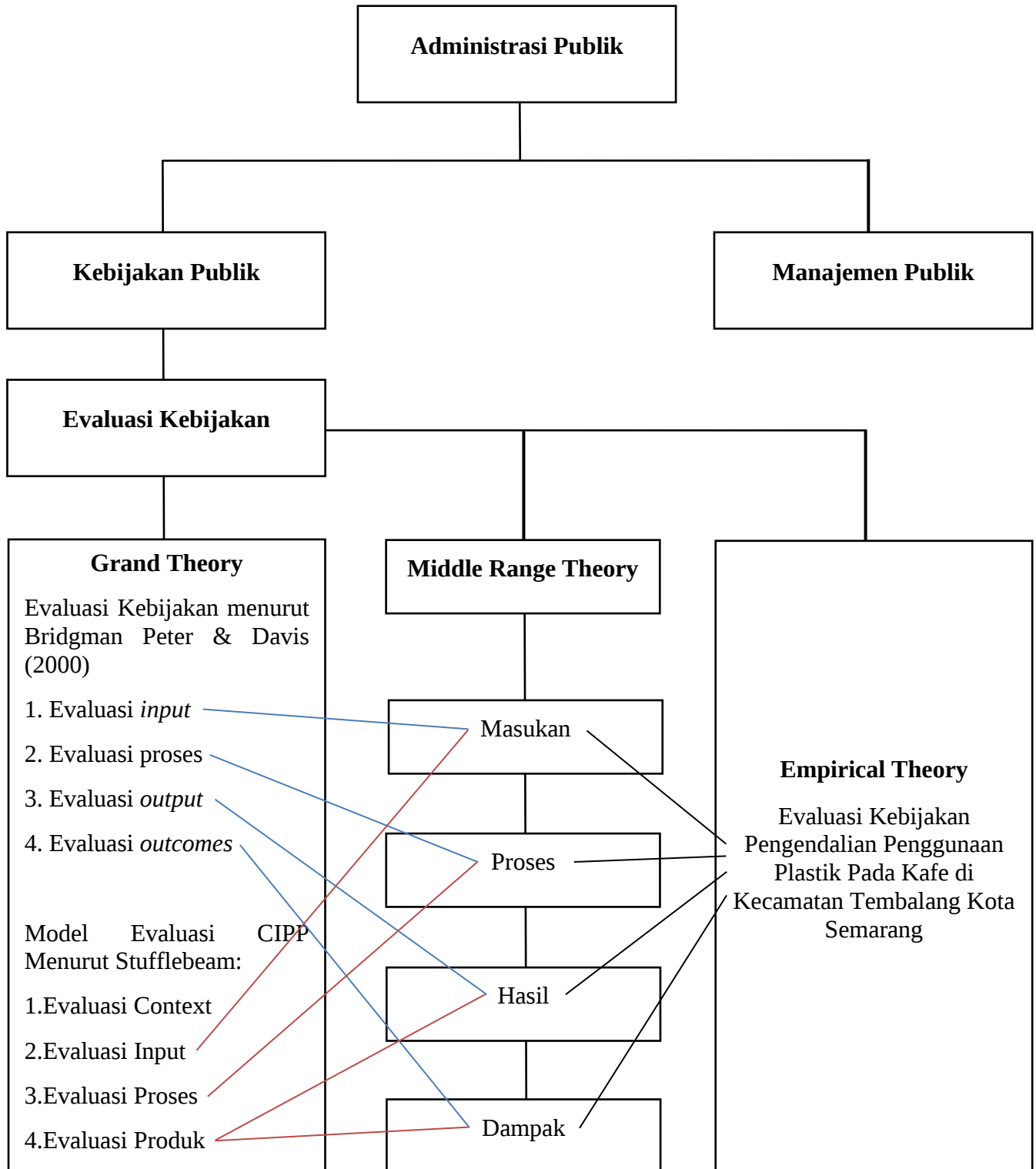
sampah, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan langkah strategis berupa Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tanggah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan upaya terhadap target pengurangan sampah plastik pada tahun 2025. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggandeng pihak swasta dan komunitas masyarakat.

Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan peraturan pelarangan penggunaan plastik secara total. Peraturan yang terbit berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota/Bupati. Hanya saja pada pelaksanaan kebijakan baru tersebut terbatas pada penggunaan kantong plastik di sektor ritel dan belum mencakup toko kelontong, warung kecil, dan pasar tradisional.

Kota Semarang terdapat peraturan penggunaan plastik yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Peraturan ini dibuat untuk meminimalkan volume, distribusi dan penggunaan plastik secara bijaksana sehingga dengan perlahan akan mengurangi sikap ketergantungan masyarakat terhadap plastik. Sasaran dari kebijakan tersebut adalah para pelaku usaha meliputi hotel, penjual makanan, dan toko modern. Penelitian ini memfokuskan kepada toko moderen berupa Kafe di Kecamatan Tembalang. Kafe tidak diperbolehkan menyediakan kantong plastik, sedotan plastik, dan *Styrofoam*. Kafe dapat menggantinya dengan penyediaan kantong ramah lingkungan, produk pipet dan pembungkus makanan yang lebih ramah lingkungan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 1. 3 Kerangka Berfikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

Table 1. 4 Oprasionalisasi Konsep

Konsep	Fenomena	Gejala
1. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Penggunaan Plastik Pada Kafe di Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Pengendalian Penggunaan Plastik	1. Pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No.27 Tahun 2019 pengendalian penggunaan plastik	Maksud dan Tujuan
		Tugas dan Wewenang
		Pengendalian penggunaan plastik
		Peran serta masyarakat
		Pengawasan
2. Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No.27 Tahun 2019 pengendalian penggunaan plastik	2. Pendukung dan Penghambat	
2.1 Masukan memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.	2.1 Masukan	Sumber Daya Manusia
		Dana
2.2 Proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari	2.2 Proses	Pelaksanaan kebijakan

metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.		
2.3 Hasil adalah berapa orang atau pihak yang berhasil mengikuti program tersebut	2.3 Hasil	Pencapaian tujuan
2.4 Dampak memfokuskan pada dampak apa yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan	2.4 Dampak	Terhadap Kafe dan Masyarakat

1.8 Argumen Penelitian

Diketahui jumlah penduduk Kota Semarang yang mencapai 1.6 juta jiwa dan akan terus meningkat dapat menyebabkan penuntutan infrastruktur sarana dan prasarana. Dengan jumlah penduduk yang banyak akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah usaha sejenis industri, rumah makan, rumah modern, pasar tradisional, dan hotel yang akan menimbulkan beberapa permasalahan yang salah satu permasalahannya mengenai jumlah timbulan sampah. Timbulan sampah di Kota Semarang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Semarang. Berdasarkan data yang diperoleh, timbulan sampah terbanyak berasal dari sampah sisa makanan dan sampah plastik. Sampah plastik menjadi permasalahan serius karena plastik sangat sulit untuk diurai oleh alam.

Seriusnya permasalahan sampah plastik, Pemerintah Kota Semarang segera mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat sehingga diperlukan partisipasi dari masyarakat dan/atau pelaku usaha. Namun nyatanya, kebijakan tersebut tidak berjalan dengan semestinya karena masih banyak dijumpai para pelaku usaha yang menggunakan plastik dalam bentuk kantong plastik, pipet minum plastik, dan *Styrofoam* yang diberikan kepada konsumen. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dinilai kurang tegas terhadap para pelaku usaha dalam memberikan sanksi karena sanksi yang diberikan hanya berupa teguran tertulis sehingga hal tersebut dinilai sangat ringan untuk pelaku usaha.

Selain itu, kurangnya kesadaran dari masyarakat juga menjadi salah satu penyebab permasalahan plastik di Kota Semarang. Sehingga dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk membantu mengendalikan permasalahan plastik di Kota Semarang.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Sugiyono di dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Pendidikan* (2013:3), metode didefinisikan sebagai langkah ilmiah dalam memperoleh data yang tujuan dan

pengaplikasiannya tertentu. Sesuai dengan definisi tersebut juga diperoleh empat kunci yakni ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Langkah ilmiah diartikan aktivitas dalam melangsungkan penelitian yang berdasarkan kriteria secara keilmuan yakni rasional, empiris, dan sistematis. Rasional didefinisikan sebagai aktivitas dalam melangsungkan penelitian yang lebih rasional sehingga dapat dipahami oleh manusia dengan melangsungkan pengamatan guna mengetahui prosedurnya. Sedangkan definisi dari sistematis ialah upaya dalam melangsungkan penelitian dalam menerapkan sejumlah prosedur yang memiliki sifat logis (Sugiyono, 2009:2).

Pasolong dalam Metode Penelitian Administrasi Publik (2012:75) memaparkan sejumlah tipe yang terdapat di dalam penelitian, yakni:

a. Penelitian Deskriptif (Penggambaran)

Diartikan sebuah penelitian dengan melakukan penggambaran terhadap kondisi yang terjadi ketika penelitian berlangsung. Dalam tipe ini dilangsungkan upaya dalam menggambarkan, membuat sebuah catatan, melakukan penganalisaan, serta penginterpretasian ke dalam situasi saat ini. Dengan diterapkannya tipe penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi aktual dan meninjau hubungan di antara variabel terkait. Di dalam penelitian ini tidak dilangsungkan pengujian terhadap hipotesa melainkan memaparkan ke dalam bentuk informasi yang bernilai obyektif.

b. Penelitian Eksploratif (Penjajakan)

Ialah sebuah penelitian yang memiliki sifat terbuka, lalu mengeksplorasi dan tidak memiliki hipotesa, pengetahuan dalam melangsungkan penelitian terkait gejala yang hendak diteliti masih sangatlah kurang sehingga penelitian jenis ini kerap diterapkan sebagai langkah awal dalam melangsungkan penelitian deskriptif. Dengan mengeksplorasi seluruh informasi, maka permasalahan yang diangkat ke dalam penelitian dapat dirumuskan dengan jauh lebih mendetail.

c. Penelitian Explanatory (Penjelasan)

Ialah sebuah penelitian yang dimana pendeskripsianya berfokus terhadap keterkaitan antar variabel yang terdapat di dalam penelitian dan melangsungkan pengujian terhadap hipotesa yang telah dirumuskan atau *testing research*.

Sesuai dengan pemaparan di atas, maka desain penelitian yang diterapkan oleh peneliti ke dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif yang dimana penelitian ini akan memperoleh data yang berupa deskriptif atau dalam bentuk tulisan ataupun lisan (tidak menggunakan angka atau statistika) yang dimana data-data tersebut berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh pihak-pihak yang diamati. Dengan menerapkan metode kualitatif atau naturalistik, penelitian ini dilaksanakan secara alamiah sehingga hasil yang diperoleh mempresentasikan data yang peneliti temukan melalui observasi. Pemilihan desain penelitian ini disebabkan keinginan peneliti untuk melangsungkan penganalisaan

sekaligus pendeskripsian terhadap evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik pada kafe di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

1.9.2 Lokasi dan Situs Penelitian

Menurut (Moleong, 2018) lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena yang terjadi dari objek yang diteliti untuk menghasilkan data yang akurat. Penetapan lokasi penelitian ialah step yang terpenting saat melangsungkan penelitian dengan tipe kualitatif. Hal ini dikarenakan melalui penetapan lokasi dilangsungkannya penelitian, maka objek serta tujuan dilangsungkannya penelitian dapat ikut ditetapkan. Hal ini tentu akan mempermudah peneliti dalam melangsungkan penelitian. Lokasi dari penelitian dapat dilangsungkan di sebuah wilayah yang telah peneliti tentukan guna mendapatkan data primer sehingga dalam hal ini peneliti memutuskan penelitian di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan ialah seseorang ataupun sekelompok orang yang akan dimintai keterangan terkait sebuah fakta ataupun pendapat pribadi. Menurut Arikunto (2016:26) subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian atau responden disebut dengan istilah informan yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Teknik pemilihan informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive. Purposive sampling (Sugiyono, 2014) adalah

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dan informan mengetahui apa yang penulis harapkan. Subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang ikut ambil andil dalam evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik pada kafe di Kecamatan Tembalang Kota Semarang, para pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Table 1. 5 Purposive Sampling

No.	Informan	Keterangan	Jumlah
1.	Staf Bidang 4 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.	Penyelenggara kebijakan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019	1 Orang
2.	Koordinator Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.	Penanggung jawab penyelenggara kebijakan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019	1 Orang
3.	Manager Kafe Ejaan Kecamatan Tembalang.	Penerima kebijakan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019	1 Orang
4.	Pegawai Kafe Dud's Kecamatan Tembalang.	Penerima kebijakan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019	1 Orang
5.	Masyarakat Kecamatan Tembalang	Penerima kebijakan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019	1 Orang

6.	Masyarakat Kecamatan Tembalang	Penerima kebijakan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019	1 Orang
----	--------------------------------	---	---------

Sumber: data yang dikelola oleh penulis

1.9.4 Jenis Data

Wiratna Sujarweni (Sugiyono, 2014) mengungkapkan bahwa data penelitian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data non-numerik atau angka. Data ini biasanya berisi analisa saat ini pada organisasi sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan. Data kualitatif secara sederhana dapat berupa kata atau kalimat yang dapat didefinisikan. Contoh data kualitatif seperti data wawancara, data observasi, catatan-catatan dari permasalahan yang pernah dihadapi dan lain-lain.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif berupa bilangan atau angka yang dapat berubah-ubah nilainya dan variative. Dalam objek penelitian data kuantitatif dapat diperoleh dari pengolahan hasil yang berupa angka dan digunakan untuk menganalisis.

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang berasal dari wawancara dengan beberapa informan, pengamatan langsung berupa foto dan dokumentasi berupa literature jurnal terdahulu.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Sumber data menurut Sugiyono (2009:137) ialah semua hal yang bernilai informatif bagi kelangsungan penelitian terkait data penelitian. Sesuai dengan sumber data, maka dikelompokkan menjadi:

- a. Data primer ialah sebuah sumber data yang dimana diperoleh secara langsung kepada pihak yang mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2018:456) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Umumnya jenis data ini didapatkan melalui kegiatan wawancara kepada sejumlah sumber terpercaya.
 - 1) Staf Bidang 4 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
 - 2) Koordinator Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
 - 3) Manager Kafe Ejaan Kecamatan Tembalang.
 - 4) Pegawai Kafe Dud's Kecamatan Tembalang.
 - 5) Masyarakat Kecamatan Tembalang
 - 6) Masyarakat Kecamatan Tembalang
- b. Data sekunder adalah suatu sumber data yang dimana perolehannya secara tidak langsung, contoh melalui perantara pihak ketiga atau berdasarkan penganalisisan dokumen yang telah tersedia. Data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti ialah undang-undang tentang

pengelolaan sampah, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan walikota/bupati, artikel, jurnal, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian yang tengah dilaksanakan.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Pasolong dalam Metode Administrasi Publik (2012:75) dengan menghimpun data primer maka data yang sekiranya dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian dapat terkumpul dengan baik.

1. Teknik Wawancara

Menurut Pasolong, wawancara ialah aktivitas yang dimana terdapat dua belah pihak yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang memberikan jawaban yang kemudian disebut sebagai informan atau narasumber. Dalam melaksanakan wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung maupun tidak langsung.

2. Teknik Pengamatan/Observasi

Pasolong mengatakan bahwa observasi ialah sebuah kegiatan dalam melaksanakan pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap sejumlah gejala yang hendak dilaksanakan penelitian. Apabila sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penelitian, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh peneliti dan pencatatan yang sistematis beserta dapat mengontrol reliabilitas dan validitasnya, maka data yang dikumpulkan melalui metode ini dianggap sah.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen ialah rentetan kejadian yang tercatat, tergambar, ataupun terekam. Dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen, maka seluruh data penelitian yang diperoleh melalui aktivitas pengobservasian dan wawancara dapat diperlengkap dengan menggunakan data yang tersedia di dalam dokumen yang dikaji.

Menurut Sugiyono (2009:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono (2009:225) menjelaskan bahwa “dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada saat *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi”.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan. Menurut Afifudin (2009:131) wawancara adalah metode pengambilan data dengan menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Selain wawancara, peneliti juga menggunakan observasi (pengamatan) dan dokumentasi.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014) analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam teknik analisis data ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, triangulasi, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data

Mereduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian bahkan sebenarnya reduksi data dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Reduksi data dalam penelitian ini adalah memfokuskan dengan data hasil observasi, tes, dan wawancara dengan subyek yang mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan publik karena banyaknya tuntutan.

2. Triangulasi

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Triangulasi pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi

teknik adalah triangulasi yang dilakukan dengan membandingkan data hasil tes, data hasil wawancara, dan data hasil observasi selama tes berlangsung. Sedangkan triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan verifikasi data yang dilakukan secara terus menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Verifikasi dilakukan sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang terjadi dalam penelitian dan selanjutnya data-data yang diperoleh harus ditinjau ulang untuk mendapatkan data yang valid. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu setelah peneliti melakukan analisis atas data-data yang telah terkumpul yaitu berupa observasi dan wawancara.

Dalam hal mereduksi data mengenai pelaksanaan evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik pada Kafe Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Sedangkan dalam penyajian data yaitu mendeskripsikan tentang evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik pada Kafe Kecamatan

Tembalang Kota Semarang. Terakhir dalam hal penarikan kesimpulan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah.

1.9.8 Kualitas Data

Dalam melangsungkan penelitian dengan tipe kualitatif harus sesuai dengan standar akan kredibilitas yang dimana penyesuaian ini dilakukan guna penelitian yang dihasilkan memiliki tingkat kebenaran data kepercayaan yang tinggi yang dimana sesuai juga dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Lincoln dan Guba (1985) menyatakan bahwa peneliti harus dapat menjamin bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang dapat dipercaya yang memenuhi prinsip kredibilitas. Kredibel berarti peneliti dipercaya telah mengumpulkan data yang real di lapangan serta menginterpretasi data otentik tersebut dengan akurat.

Triangulasi ialah langkah yang dapat ditempuh apabila hendak memeriksa nilai keabsahan sebuah data berdasarkan sumbernya. Hal ini berarti perlunya sebuah upaya dalam melangsungkan perbandingan dan mengeceknya berulang kali sehingga memperoleh sebuah informasi yang dapat dipercaya keakuratannya. Dengan dilakukan triangulasi maka peneliti dapat lebih memahami apa yang ia peroleh dari kegiatan penelitian. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi teori antara lain (Bandur, 2014:242-243).

1. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan melalui penggunaan berbagai teknik atau metode untuk menganalisis suatu masalah. Dalam triangulasi teknik,

data yang diperoleh dari metode tertentu akan dicek dengan metode yang lain. Apabila bicara mengenai triangulasi teknik, maka peneliti dianjurkan menggabungkan teknik pengumpulan data yang sekiranya mampu menghasilkan data yang terdalam yakni wawancara dan observasi. Selain itu, dengan melakukan penggabungan teknik pengumpulan data, maka peneliti akan lebih mudah mendapatkan informan yang lebih banyak sehingga juga mempermudah dalam hal analisis perbandingan.

2. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber data penelitian dilakukan melalui penggunaan berbagai sumber data yang beragam dalam penelitian. Hal ini bermakna bahwa dalam penelitian yang kredibel, peneliti kualitatif juga perlu dilengkapi dengan data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang seperti laporan bulanan, tahunan, notulen rapat, catatan lapangan atau jurnal harian peneliti. Dengan kata lain, peneliti tidak hanya membutuhkan data primer atau sekunder saja melainkan kedua jenis data tersebut. Dengan ini, maka peneliti dapat membandingkan hasil informasi yang didapatkan dari berbagai sumber yang ada.

3. Triangulasi teori

Triangulasi teori dilakukan melalui penggunaan berbagai perspektif ganda untuk menginterpretasi suatu data. Dalam hal triangulasi teori, peneliti juga perlu memperhatikan triangulasi teori (kerangka teoritis) dan kerangka konseptual yang membantu peneliti untuk

mengidentifikasi sub tema dan tema-tema utama penelitian. Semakin banyak peneliti menggunakan dan menganalisis kajian literatur, maka akan semakin banyak peneliti dalam mengidentifikasi informasi yang ada terkait dalam permasalahan penelitian. Namun, perlu diingat bahwa kajian literatur yang digunakan haruslah merupakan hasil penelitian yang valid, bukan hanya sebatas *stipulative imaginative*. Selain itu, juga menjadi hal penting apabila peneliti menggunakan konsep teoritis yang telah digunakan oleh peneliti lain yang terdahulu dengan topik yang sama namun fokus dan konteks yang berbeda.

Nilai yang terletak didalam teknik dalam menghimpun data dengan menerapkan triangulasi ialah langkah paling sesuai apabila hendak mengetahui data yang didapatkan dengan lebih luas lagi, berubah-ubah atau kontradiksi. Sehingga penerapan teknik triangulasi dalam menghimpun data penelitian menyebabkan data yang diperoleh bernilai konsisten, tuntas, dan akurat. Penerapan triangulasi mengakibatkan data lebih kuat apabila dibandingkan dengan menerapkan satu pendekatan. Langkah dalam mentriangulasi data yakni (Moleong, 2009: 330-331):

1. Membuat sebuah perbandingan data yang diperoleh melalui aktivitas pengamatan dengan data yang didapatkan melalui aktivitas wawancara.
2. Membentuk sebuah perbandingan dengan pernyataan yang dikatakan kepada khalayak umum dengan pernyataan yang diungkapkan secara personal.

3. Melakukan sebuah perbandingan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh publik terkait situasi selama penelitian berlangsung.
4. Membentuk sebuah perbandingan terkait kondisi dan sudut pandang seseorang dalam berpendapat yakni berdasarkan tingkat pendidikan dan kedudukannya.
5. Melakukan sebuah perbandingan terkait hasil yang didapatkan melalui aktivitas wawancara terhadap sebuah dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini.

Dalam penelitian evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik pada Kafe Kecamatan Tembalang Kota Semarang menggunakan ketiga gabungan triangulasi. Sebab dalam penelitian ini kedepannya peneliti akan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan mengecek data lalu menguji. Informan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang diwawancara sekitar pukul 09.00–10.30 WIB agar lebih kondusif dan informan dalam kondisi masih segar dalam memberikan informasi. Penggunaan kombinasi tiga triangulasi ini dimaksudkan agar data yang diperoleh tidak diragukan lagi keabsahannya.